

Keberhasilan ! Wahai sekalian dewata yang berkuasa, yang sedang berkumpul dan melindungi Kadātuan Śrīwijaya ini; kamu sekalian dewa-dewa yang mengawali permulaan segala sumpah ! Bilamana di pedalaman semua daerah yang berada di bawah Kadātuan ini akan ada orang yang memberontak yang bersekongkol dengan para pemberontak, yang berbi-cara deris, yang berontak, yang mendengarkan kata pemberontak; yang mengenal pemberontak, yang tidak berpilak, yang tidak takluk, yang tidak setia pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai raja; yang menganiaya, yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah pertama paruh terang bulan margha dan keluarga; yang berani mati kena kutuk biar [...] takluk kepada [...] (Genmanan bebas Coedes)

BAB V – ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

5.1 PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam membangun kepariwisataan dibutuhkan prinsip-prinsip yang menjadi ideologi yang harus dianut dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi sebagai:

1. Pondasi yang mendasari pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Sebagai nilai-nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sebagai nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal yang tercantum pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Dasar Pertimbangan Penentuan Prinsip-prinsip Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I. Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisata di Tingkat internasional

Pada skala internasional, prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan masih menjadi prinsip yang menjadi ideologi pembangunan kepariwisataan sejak awal tahun 2000-an. Bahkan, pembangunan kepariwisataan global yang saat ini dihadapkan pada tantangan pencapaian tujuan pembangunan global *Millennium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai tahun 2015, mulai diarahkan pada tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs yang muncul sebagai respon dari kerusakan lingkungan yang masih menjadi masalah penting di antara keberhasilan negara-negara di dunia dalam pencapaian MDGs, mengusung tiga pilar penting dalam pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. SDGs merupakan prinsip pembangunan yang menggabungkan antara *green growth*, yang mengaitkan elemen ekonomi dengan lingkungan; dengan *inclusive growth*, yang mengaitkan elemen sosial dengan lingkungan. SDGs merupakan suatu upaya untuk menghubungkan sejumlah titik isu global, yaitu ketidakadilan, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, tekanan terhadap lingkungan, air, energi, dan ketahanan pangan.

Selain prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, kepariwisataan global juga mengedepankan etika dalam pembangunan maupun pengelolaan pariwisata. Pada tanggal 1 Oktober 1999, telah ditandatangani Kode Etik Kepariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) yang menjadi kesepakatan seluruh negara, perusahaan, institusi, dan lembaga kepariwisataan di dunia di Santiago, Chili. Kode Etik Kepariwisata Dunia memiliki sepuluh pasal: sembilan pasal berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi etika kepariwisataan dunia, satu pasal berisi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Kode Etik Kepariwisata Dunia.

Sembilan prinsip umum dalam Kode Etik Kepariwisata Dunia adalah:

- a) Kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antarpenduduk dan masyarakat;
- b) Kepariwisata sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorang maupun secara kolektif;
- c) Kepariwisata sebagai faktor pembangunan berkelanjutan;
- d) Kepariwisata sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
- e) Kepariwisata adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan;
- f) Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- g) Hak dasar berwisata;
- h) Kebebasan bergerak wisatawan;
- i) Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

Sementara itu, satu pasal yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisata Dunia adalah:

- a) Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata harus bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisata Dunia serta memantau efektifitas pelaksanaannya;
- b) Para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus mengakui peranan berbagai organisasi internasional, diantaranya pada urutan pertama adalah Organisasi Kepariwisata Dunia, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi serta bergerak di bidang pembangunan kepariwisataan, perlindungan Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup maupun kesehatan, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip umum hukum internasional;
- c) Para pemangku kepentingan yang sama harus menyampaikan keinginannya, dalam hal terjadi perselisihan dalam penerapan atau penafsiran terhadap Kode Etik Kepariwisata Dunia untuk melakukan mediasi kepada lembaga ketiga yang tidak memihak yang disebut sebagai Komisi Dunia untuk Etika Kepariwisata.

2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisata yang Berkembang pada Skala Nasional

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Memberdayakan masyarakat setempat;
- f) Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h) Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 juga sudah menetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan dengan berprinsip pada **pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan**. Berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut, prinsip-prinsip yang menjadi ideologi pembangunan kepariwisataan nasional pada dasarnya terdiri dari tiga, yaitu:

- a) Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b) Integrasi/keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah, serta antarpemangku kepentingan;

- c) Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Isu-isu Pembangunan Kepariwisata Nasional

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 bagian penjelasan telah dibahas beberapa hal penting yang menjadi isu-isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan nasional, yaitu:

- a) Pariwisata sebagai instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual;
- b) Peningkatan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa melalui pariwisata sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian;
- c) Pengembangan sektor pariwisata yang terarah dan profesional dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- d) Pembangunan kepariwisataan yang meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing kepariwisataan Indonesia dalam peta kepariwisataan regional maupun internasional.

Selain keempat isu strategis di atas yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional, diskusi-diskusi isu strategis yang berkembang dalam pembangunan kepariwisataan nasional saat ini adalah:

- a) Keterpaduan sektoral dan kewilayahan dalam meningkatkan pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing nasional, regional, dan global;
- b) Pengembangan sistem jasa, infrastruktur, dan layanan yang handal dalam mewujudkan pengembangan kepariwisataan yang profesional;
- c) Pemasaran yang aktif, intensif, dan fokus.

4. Isu-Isu Pembangunan Kepariwisata Provinsi

Isu pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati oleh para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para pelaku usaha pariwisata, seniman, dan budayawan pada saat penyusunan Strategi Pengembangan Destinasi Unggulan dan Desa Wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012. Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung pengembangan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata nasional;
- b) Kepemimpinan yang konsisten dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada pariwisata;
- c) Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata nasional;

- d) Keterpaduan pembangunan seluruh sektor dan pemerintahan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan sebagai sektor ekonomi andalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e) Pariwisata sebagai alat bagi penguatan struktur ekonomi masyarakat;
- f) Pariwisata sebagai pengendali pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan;
- g) Pariwisata untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan terhadap sumber daya alam dan budaya Kepulauan Bangka Belitung;
- h) Pariwisata untuk memberikan nilai tambah bagi kawasan pertimahan.

5. Visi dan Misi Pembangunan Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam merumuskan prinsip pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menjadi dasar pertimbangan yang sangat penting. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu” **Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agribahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera**”. Selain visi, telah ditetapkan pula misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agribahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah provinsi kepulauan bangka belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sdm melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan imtaq;
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (*good local governance*) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil;
4. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender;

5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Mengacu pada dasar-dasar pertimbangan di atas, prinsip-prinsip yang menjadi ideologi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat menjadi kerangka dasar untuk mewujudkan:

1. Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beretika sosial dan budaya, artinya menjadikan norma agama, sosial, dan budaya sebagai landasan utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan;
2. Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengedepankan pemenuhan hak dasar berwisata, baik bagi penduduk maupun wisatawan;
3. Keterpaduan seluruh sektor dan pemerintahan dalam mendukung upaya perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Perlindungan terhadap sumber daya alam dan budaya, khususnya yang berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan memberikan peran lebih besar kepada masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pariwisata;
6. Peningkatan apresiasi masyarakat dan wisatawan terhadap sumber daya alam dan budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mendorong kesempatan pemanfaatan daya tarik wisata alam dan budaya yang sama antara masyarakat dan wisatawan.

Prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang mampu menjawab keenam hal di atas adalah:

1. Pembangunan Kepariwisata yang **Bertanggung Jawab (Responsible Tourism)**
2. Pembangunan Kepariwisata **Terpadu** (Antarkomponen Pariwisata, Lintas Sektor, Lintas Wilayah, Antarpelaku)
3. Pembangunan Kepariwisata **Berbasis Masyarakat**
4. Pembangunan Kepariwisata **Beridentitas Lokal, Berwawasan Global.**

5.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

5.2.1 VISI

Visi pembangunan kepariwisataan adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode perencanaan tahun 2016 - 2025. Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Sebagai dasar dalam merumuskan misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal yang tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 5.2 Dasar pertimbangan perumusan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rumusan visi yang diusulkan untuk pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

“Kepulauan Bangka Belitung sebagai Destinasi Pariwisata Bahari dan Budaya Berdaya Saing Global yang Terpadu dan Bertanggung Jawab untuk Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan Berkelanjutan”

5.2.2 MISI

Misi adalah pernyataan rumusan mengenai komitmen untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfungsi:

- a) Sebagai pengejawantahan dari visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Memberikan arah dalam merumuskan rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana

kawasan pengembangan pariwisata, dan rencana kawasan strategis pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- d) Memberikan arah dalam merumuskan program pembangunan setiap aspek pembangunan kepariwisataan.

Berikut ini misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Membangun destinasi pariwisata yang memadukan potensi sumber daya bahari dan budaya khas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.
2. Membangun industri pariwisata yang bertanggung jawab, beridentitas lokal, dan berstandar internasional.
3. Membangun pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata bahari dan budaya berdaya saing global.
4. Membangun kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan perwujudan sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global.

Perumusan misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan mempertimbangkan: a) prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan, b) isu strategis pembangunan kepariwisataan, dan c) visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti yang digambarkan di bawah ini.



Gambar 5.3 Dasar Pertimbangan Perumusan Misi Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5.2.3 TUJUAN

Tujuan pembangunan kepariwisataan merupakan kondisi yang harus dicapai kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir masa perencanaan. Tujuan pembangunan kepariwisataan harus mengintegrasikan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Fungsi dari tujuan pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) Menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Memberikan arah dalam perumusan rencana pengembangan perwilayahan pariwisata Kabupaten Belitung, yang terdiri dari rencana struktur perwilayahan pariwisata, rencana kawasan pengembangan pariwisata kabupaten, dan rencana kawasan strategis pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c) Memberikan arah dalam perumusan program pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perumusan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti yang digambarkan berikut ini.



Gambar 5.4 Dasar Pertimbangan Perumusan Tujuan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut.

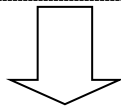
- a) Mengembangkan daya tarik wisata bahari dan budaya khas berbasis masyarakat sebagai unggulan dan pendorong perkembangan daya tarik wisata lain.
- b) Meningkatkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional dalam mendorong investasi pariwisata.
- c) Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagai unggulan kepariwisataan provinsi.

- d) Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan berkinerja tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal.
- e) Meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata dengan perdagangan dan investasi, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dengan pemasaran pariwisata nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata berbasis bahari dan budaya berdaya saing global.
- f) Mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggungjawab untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berkualitas
- g) Mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi internasional untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi berdaya saing global.
- h) Mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan dipimpin untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

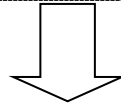
Keterkaitan antara prinsip visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

PRINSIP

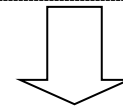
1. Pembangunan Kepariwisata yang **Bertanggung Jawab (Responsible Tourism)**
2. Pembangunan Kepariwisata **Terpadu** (Antarkomponen Pariwisata, Lintas Sektor, Lintas Wilayah, Antarpelaku)
3. Pembangunan Kepariwisata **Berbasis Masyarakat**
4. Pembangunan Kepariwisata **Beridentitas Lokal, Berwawasan Global.**



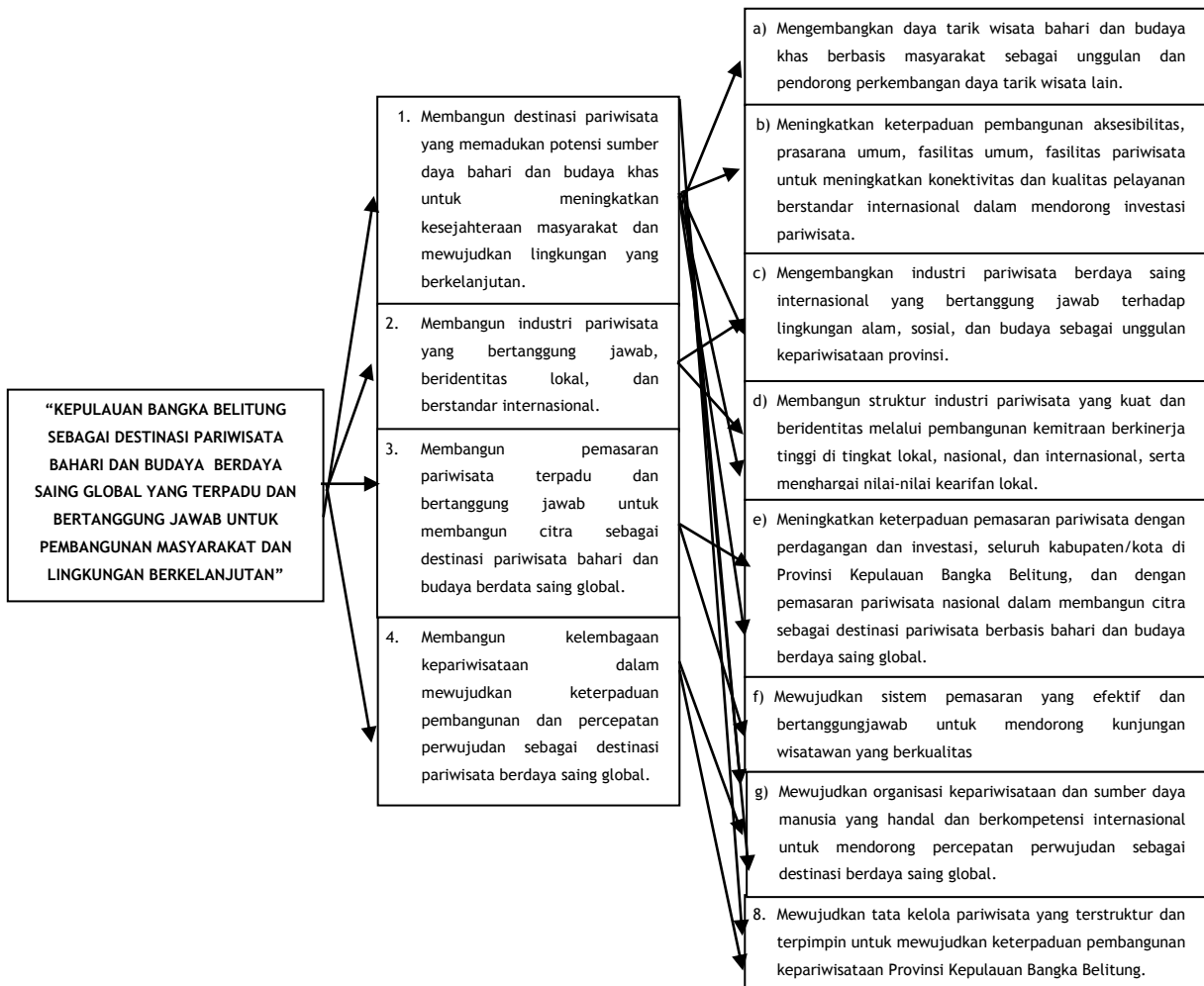
VISI



MISI



TUJUAN



Gambar 5.5 Keterkaitan Antara Prinsip, Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung